

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KABUPATEN LAMONGAN

Denny Iswanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijaya Putra  
Jl. Pd. Benowo Indah No. 1-3 Kota Surabaya  
Email: [dennyiswanto@uwp.ac.id](mailto:dennyiswanto@uwp.ac.id)

### ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Kabupaten Lamongan menjadi salah satu daerah pelaksana yang memiliki karakteristik sosial ekonomi beragam dan kesiapan kelembagaan berbeda, sehingga implementasi program ini perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan MBG di Kabupaten Lamongan dianalisis dengan 3 (tiga) subbab utama yaitu (1) Mekanisme Pelaksanaan; (2) Tata Kelola Pembiayaan; dan (3) analisis tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan MBG. Metode penelitian menggunakan analisis data sekunder, meliputi telaah dokumen perencanaan daerah, laporan implementasi MBG, regulasi turunan, publikasi pemerintah, serta data statistik terkait gizi, pendidikan, dan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBG di Lamongan telah memiliki dasar regulatif yang memadai dengan dukungan komitmen pemerintah daerah, namun menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas fiskal, variasi kesiapan infrastruktur penyedia makanan di sekolah, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sepenuhnya optimal. Potensi integrasi MBG dengan pemberdayaan UMKM pangan dan pemanfaatan produk lokal menjadi faktor pendukung yang signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola implementasi, harmonisasi regulasi teknis, serta peningkatan kualitas perencanaan berbasis data agar program MBG dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan kebijakan gizi berbasis sekolah dan peningkatan efektivitas program sosial di tingkat daerah.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Makan Bergizi Gratis, Kabupaten Lamongan.

### ABSTRACT

*The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a national strategic policy aimed at improving the nutritional quality of school children while strengthening human resource development. Lamongan Regency is one of the implementing regions with diverse socio-economic characteristics and different institutional readiness, so the implementation of this program requires an in-depth study. This study aims to analyze the implementation of the MBG policy in Lamongan Regency, analyzed with 3 (three) main sub-chapters, namely (1) Implementation Mechanism; (2) Financing Governance; and (3) analysis of challenges faced in the MBG policy implementation process. The research method uses secondary data analysis, including a review of regional planning documents, MBG implementation reports, derivative regulations, government publications, and statistical data related to nutrition, education, and poverty. The results of the study indicate that the implementation of MBG in Lamongan has an adequate regulatory basis with the support of local government commitment, but faces obstacles in the form of limited fiscal capacity, variations in the readiness of food supply infrastructure in schools, and coordination across regional agencies that is not yet fully optimal. The potential for integrating MBG with the empowerment of food MSMEs and the utilization of local products is a significant supporting factor. This study recommends strengthening implementation governance, harmonizing technical regulations, and improving the quality of data-driven planning to ensure the MBG program is effective and sustainable. These findings are expected to contribute to the development of school-based nutrition policies and the effectiveness of social programs at the regional level.*

**Keywords:** Policy Implementation, Free Nutritious Meals, Lamongan Regency

## PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, tetapi juga melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah (Ahsan & Alfaries, 2025). Permasalahan gizi seperti stunting, anemia, kekurangan energi kronis, serta ketimpangan akses pangan bergizi masih menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia hingga saat ini (Iswanto et al., 2026; Priyantomo, Suprayoga, et al., 2026). Kondisi tersebut berdampak pada kualitas kesehatan, perkembangan kognitif, produktivitas, dan daya saing generasi muda di masa depan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah ditetapkan sebagai salah satu intervensi kebijakan publik skala besar yang menjadi prioritas utama pemerintah nasional, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dan mengatasi masalah gizi, terutama pada kelompok usia rentan seperti pelajar dan ibu hamil (Putra & Marsal, 2025). Mandat implementasi kebijakan ini ditegaskan melalui dasar hukum utama, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024, yang menyediakan payung hukum bagi implementasi program di seluruh daerah (Hakim & Yuliana, 2025). Keberadaan Perpres ini menandai MBG sebagai program *top-down* yang memerlukan adaptasi dan akomodasi cepat di tingkat pemerintah daerah.

Secara konseptual, MBG dirancang dengan tujuan ganda. Selain fokus pada perbaikan gizi dan kesehatan, program ini juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan, diharapkan mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effects*) yang substansial. Kajian menunjukkan bahwa program MBG dapat mempengaruhi PDB melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan impor, didorong oleh transmisi dampak melalui sektor pangan, upah, logistik, transportasi, dan pergudangan (INDEF, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi program ini di tingkat daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyelaraskan tujuan gizi dengan strategi penguatan ekonomi lokal.

Kabupaten Lamongan, sebagai salah satu wilayah yang memulai fase implementasi program MBG pada tahun 2025, menjadi studi

kasus penting untuk menganalisis adaptasi kebijakan terdesentralisasi (Syafiqoh & Setyawati, 2025). Lamongan memiliki basis kinerja gizi yang relatif kuat sebelum program MBG diluncurkan. Data lokal menunjukkan Kabupaten Lamongan berhasil mencapai penurunan prevalensi stunting yang drastis, dari 27,5% menjadi 9,4% (Dinas Kominfo Jawa Timur, 2025). Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya inovasi program gizi lokal, seperti program 1-10-100, yang mendapat apresiasi dari Tim Panelis Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur.

Ketersediaan bahan baku juga merupakan faktor penting. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan menargetkan stabilitas produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 1,2 juta ton, sebanding dengan hasil produksi tahun 2023, dan terus berupaya menjaga potensi pertanian di tengah musim kemarau (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2024). Kondisi ketahanan pangan yang memadai ini memberikan pondasi logistik yang baik bagi pelaksanaan program MBG yang berbasis pada pasokan bahan baku lokal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan MBG di Kabupaten Lamongan, mengidentifikasi tantangan tata kelola dan integrasi kebijakan lokal dengan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta mengevaluasi isu-isu kritis terkait kualitas dan keamanan pangan pada tahap awal.

Konteks Lamongan yang telah berhasil menurunkan stunting secara signifikan sebelum MBG diluncurkan menimbulkan isu kebijakan penting: bagaimana memastikan program MBG berfungsi sebagai penguat kualitas program gizi yang sudah mapan, bukan sebaliknya, menyebabkan *crowding-out* atau pengalihan fiskal dari program lokal yang terbukti berhasil. Implementasi yang dipercepat (Agustus 2025) tanpa adanya pembahasan anggaran khusus di Raperda APBD 2025 (November 2024) 5 mengindikasikan bahwa implementasi awal sangat bergantung pada transfer pusat (APBN) atau realokasi, yang dapat melemahkan pengawasan anggaran dan keberlanjutan perencanaan fiskal daerah. Analisis ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai adaptasi kebijakan terdesentralisasi, menilai risiko dan peluang integrasi ekonomi lokal, dan menyusun rekomendasi untuk peningkatan

kualitas dan keamanan pangan program skala masal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain Studi Kasus (*Case Study*) dengan pendekatan analisis data sekunder kualitatif. Fokus utama adalah pada implementasi kebijakan MBG di Kabupaten Lamongan selama periode awal peluncuran (2024-2025). Data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber kredibel dan relevan yang mencakup beberapa domain:

1. Regulasi dan Kebijakan Publik: Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.
2. Laporan Resmi Pemerintah Daerah: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2024, serta laporan dari Kominfo Provinsi Jawa Timur.
3. Kajian Lembaga Non-Pemerintah: Laporan lembaga *Think Tank* dari INDEF mengenai kerangka transmisi dampak MBG dan rekomendasi dari CISDI terkait risiko fiskal.
4. Artikel Ilmiah dan Jurnal: Publikasi yang membahas analisis dampak program gizi terhadap kesejahteraan pelajar, implementasi program pangan lokal di Lamongan, dan mekanisme evaluasi bantuan pangan
5. Laporan Media Kredibel: Berita dan artikel dari media massa nasional dan lokal (Antara, Times, Bangsaonline, Kominfo) yang mendokumentasikan proses perencanaan, peluncuran, dan tantangan (termasuk insiden keracunan) di Lamongan selama tahun 2024-2025.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Mekanisme Pelaksanaan Program*

Kabupaten Lamongan segera memulai implementasi MBG, dengan peluncuran awal terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2025. Sebagai contoh, program ini tercatat dimulai di SMK Negeri 1 Lamongan pada tanggal 19 Agustus 2025 (SMKN 1 Lamongan, 2025). Program MBG tidak hanya menasar siswa sekolah, tetapi juga kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil dan balita, sesuai dengan target nasional (Gultom, 2025). Selain itu, implementasi MBG di Lamongan juga diikuti penguatan dapur komunitas dan integrasi dengan program penurunan stunting, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan.

Di Lamongan, pelaksanaan teknis program diserahkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (Syafiqoh & Setyawati, 2025). Dapur MBG di Lamongan terdistribusi di sebelas titik lokasi untuk memastikan cakupan dan kedekatan dengan penerima manfaat (Ratmawati, 2025). Dalam hal kualitas gizi, Pemkab Lamongan berkomitmen menyajikan menu yang disesuaikan dengan pedoman "isi piringku," yang mencakup karbohidrat, protein nabati, protein hewani, dan sayur. Untuk mengatasi masalah penerimaan, SPPG Lamongan merencanakan 22 menu berbeda yang berotasi selama hari kerja, dan juga mengelola data alergi siswa untuk memastikan menu yang disajikan aman dan sesuai (Subagyo, 2025). Selain manfaat gizi, sekolah juga melaporkan bahwa MBG diharapkan mampu menumbuhkan karakter siswa seperti kedisiplinan, kebersihan, dan rasa syukur.

Inovasi kunci dalam implementasi MBG di Lamongan adalah integrasi strategis antara program nasional MBG dengan program penguatan ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Lamongan, melalui Bupati Yuhronur Efendi, menginisiasi perjanjian kerja sama yang melibatkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai pemasok bahan baku utama bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (Ainun, 2025a). Model ini merupakan upaya taktis untuk mengarahkan efek pengganda ekonomi MBG secara langsung ke tingkat komunitas, sesuai dengan kerangka INDEF yang menekankan pelibatan ekonomi lokal (INDEF, 2024). KDMP ditugaskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi desa melalui kegiatan gotong royong, sekaligus berfungsi sebagai pusat kegiatan multifungsi dan syarat pencairan Dana Desa.

Contoh implementasi kerja sama ini mencakup: (1) KDMP Banjarmedalan menyuplai komoditas seperti bawang merah, bawang putih, gula, dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke SPPG Banjarmedalan; dan (2) KDMP Made menyuplai gula, minyak goreng, beras, dan LPG ke SPPG Made (Ainun, 2025a). Integrasi ini bertujuan untuk memastikan produksi, pengawasan kualitas, dan distribusi makanan berjalan aman, higienis, dan tepat waktu, serta menumbuhkan ekonomi di masyarakat pedesaan.

Pemanfaatan KDMP sebagai pemasok menunjukkan disposisi adaptif Pemkab Lamongan, yang berupaya mengatasi tantangan logistik dan modal yang sering dihadapi oleh

distributor kecil (seperti yang dialami *e-Warong* dalam program pangan non-tunai sebelumnya), dengan menggabungkan dua program nasional/lokal menjadi satu rantai pasok yang terintegrasi (Manshuri, 2025). Namun, strategi ini juga memperkenalkan kebutuhan untuk penguatan kapasitas manajerial dan finansial koperasi desa.

### Pengawasan MBG di Kabupaten Lamongan

Pengawasan Program MBG di Kabupaten Lamongan dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah. Salah satu instrumen pengawasan yang paling penting adalah Rapat Evaluasi Program MBG, yang menghadirkan Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappelitbangda, perangkat daerah terkait, Koordinator Wilayah, serta para Kepala SPPG dari 27 kecamatan (Bappelitbangda Lamongan, 2025). Rapat ini menunjukkan bahwa pengawasan MBG tidak hanya bersifat administratif, tetapi dilakukan secara kolektif melalui forum evaluasi lintas sektor.



Gambar 1. Foto Rapat Evaluasi MBG  
Sumber: (Bappelitbangda Lamongan, 2025)

Koordinator SPPG Kabupaten Lamongan menambahkan bahwa dari 70 SPPG yang telah disetujui Badan Gizi Nasional, sebanyak 40 SPPG sudah aktif beroperasi, dan seluruh Kepala SPPG diimbau untuk meningkatkan koordinasi terkait pendataan

penerima manfaat, pengawasan distribusi, dan pendampingan operasional di lapangan (Bappelitbangda Lamongan, 2025; Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2025). Mekanisme ini menunjukkan model pengawasan berlapis: mulai dari sekolah, kecamatan, perangkat daerah, hingga satgas kabupaten. Dengan adanya sistem evaluasi terjadwal, pelaporan rutin, dan pengawasan lapangan, Kabupaten Lamongan berupaya memastikan bahwa implementasi MBG berlangsung sesuai standar mutu serta dapat memberikan dampak optimal bagi peningkatan gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan.

### Analisis Tantangan dalam Implementasi Kebijakan MBG di Kabupaten Lamongan

#### 1. Tantangan Keamanan Pangan (*Food Safety Crisis*)

Fase awal implementasi MBG di Lamongan menghadapi tantangan signifikan terkait keamanan pangan. Pada September 2025, sebanyak 13 siswa di SMAN 2 Lamongan mengalami gejala keracunan (pusing, mual, muntah) yang diduga berasal dari santapan MBG (CNN Indonesia, 2025). Insiden ini merupakan kegagalan kualitas kritis dan menyoroti kerentanan sistem *Quality Control* (QC) dalam rantai pasok MBG.

Tindak lanjut pasca-insiden dilakukan dengan menghentikan program di SMAN 2 Lamongan sementara waktu. Insiden keracunan ini menunjukkan bahwa aspek sanitasi adalah prasyarat keberhasilan gizi. Meskipun tujuan utama MBG adalah meningkatkan asupan gizi, risiko kontaminasi dari infrastruktur limbah yang buruk (yang diakui dengan adanya dorongan KSP untuk pembangunan IPAL) atau penanganan makanan yang tidak higienis dapat meniadakan semua manfaat gizi dan justru menimbulkan risiko kesehatan serius (Emmanulle et al., 2025; Riyanto & Sinaga, 2025).

Tabel 1. Tantangan Kualitas dan Respons Kebijakan

Aspek	Temuan Data	Implikasi Kebijakan
Kejadian	13 siswa SMAN 2 Lamongan mengalami keracunan (Sept 2025).	Menunjukkan kerentanan sistem QC di dapur SPPG atau distribusi <i>last mile</i> .
Respon Langsung	Program dihentikan sementara di lokasi insiden.	Tindakan pencegahan yang tepat tetapi mengganggu kontinuitas program.
Respon Jangka Menengah	Bupati Lamongan menjanjikan evaluasi total, termasuk menu dan penyajian, dan uji lab sampel.	Kebutuhan mendesak untuk merumuskan ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) sanitasi dan keamanan pangan.

Sumber: (CNN Indonesia, 2025)

## 2. Tantangan Gizi Kultural

Meskipun Lamongan telah menyusun menu yang beragam (22 menu) dan bergizi sesuai panduan *Isi Piringku*, tantangan signifikan muncul pada aspek penerimaan makanan, khususnya sayuran. Laporan evaluasi MBG di Lamongan mengindikasikan bahwa minat konsumsi sayuran oleh pelajar masih rendah (Ainun, 2025b).

Tantangan ini menunjukkan bahwa Lamongan, dengan tingkat stunting yang sudah rendah, harus menggeser fokus dari sekadar penyediaan kalori (kuantitas gizi) menjadi perubahan perilaku dan kualitas gizi (penerimaan makanan). SPPG Lamongan merespons dengan strategi adaptif, seperti mengganti-ganti menu sayur setiap hari agar anak-anak tidak bosan atau menolak (Budiansyah, 2025). Namun, tantangan resistensi kultural terhadap sayuran memerlukan intervensi yang lebih dalam daripada sekadar diversifikasi menu. Program MBG perlu dipadukan dengan edukasi gizi intensif untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan makan pelajar, menjadikan waktu makan sebagai bagian dari pengalaman belajar.

## 3. Keterbatasan Infrastruktur dan Logistik

Efektivitas implementasi MBG terancam oleh isu infrastruktur dasar. Dorongan dari Kantor Staf Presiden untuk percepatan pembangunan IPAL di Lamongan secara eksplisit mengakui bahwa fasilitas sanitasi yang tidak memadai dapat menjadi penghambat utama keberlanjutan program gizi massal yang melibatkan 11 titik dapur SPPG (Subagyo, 2025).

Selain sanitasi, tantangan logistik yang dihadapi program pangan sebelumnya di Lamongan, seperti masalah data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak akurat, kompleksitas birokrasi, dan infrastruktur jalan yang buruk, perlu dihindari dalam MBG. Meskipun model KDMP-SPPG berpotensi menyelesaikan masalah pasokan dan modal, risiko keterlambatan atau penurunan kualitas selama transportasi dari KDMP ke SPPG, dan dari SPPG ke sekolah, tetap tinggi jika masalah jalan atau infrastruktur penyimpanan tidak diatasi (Manshuri, 2025).

## KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan pada tahap awal (2025) dicirikan oleh respons kelembagaan yang cepat dan adaptif, dengan indikasi disposisi implementatif yang kuat. Lamongan berhasil merancang model tata kelola inovatif melalui integrasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang secara efektif menyelaraskan tujuan gizi nasional dengan kerangka penguatan ekonomi pedesaan. Meskipun demikian, fase awal ini dihadapkan pada tiga tantangan utama yang harus segera diatasi: (1) Kegagalan kritis dalam keamanan pangan, yang ditandai dengan insiden keracunan yang menuntut perbaikan mendasar pada sistem jaminan kualitas; (2) Tantangan infrastruktur sanitasi, yang dikonfirmasi oleh kebutuhan mendesak untuk pembangunan IPAL; dan (3) Tantangan gizi kultural, di mana menu bergizi belum sepenuhnya diterima (terutama konsumsi sayuran) oleh penerima manfaat. Keberhasilan

jangka panjang MBG di Lamongan akan sangat ditentukan oleh kemampuan Pemkab untuk menjaga sinergi dengan program gizi lokal yang sudah sukses dan memperkuat akuntabilitas fiskal melalui pengawasan DPRD yang proaktif.

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

- a. Penguatan Jaminan Keamanan Pangan Melalui Protokol HACCP: Pemerintah Kabupaten harus segera mewajibkan sertifikasi kebersihan dan penerapan protokol HACCP yang ketat di seluruh 11 dapur SPPG. Pengawasan harus berlapis, melibatkan Dinas Kesehatan dan pihak independen, dan mengimplementasikan saran DPRD untuk menunjuk petugas pencicip wajib sebelum makanan didistribusikan.<sup>17</sup>
- b. Percepatan dan Pengalokasian Dana Infrastruktur Sanitas: Alokasi anggaran (baik dari APBD maupun dana Transfer APBN) harus segera diprioritaskan untuk percepatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sekitar lokasi dapur SPPG

dan sekolah. Upaya ini, yang didorong oleh Kantor Staf Presiden 18, sangat penting untuk meminimalkan risiko kontaminasi lingkungan dan memastikan standar higienitas yang diperlukan oleh program massal.

- c. Strategi Edukasi Gizi Berbasis Perilaku: Untuk mengatasi masalah penerimaan makanan (khususnya sayuran), MBG harus disandingkan dengan program edukasi perilaku gizi yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Strategi ini harus berfokus pada peningkatan penerimaan makanan melalui metode interaktif dan partisipatif, daripada sekadar mengandalkan diversifikasi menu.
- d. Optimalisasi Pengawasan Fiskal dan Kelembagaan: DPRD Lamongan (Komisi D) harus menyelesaikan pembahasan anggaran MBG dalam APBD 2025 secara proaktif.<sup>12</sup> Pengawasan fiskal yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pendanaan MBG sekaligus memastikan program gizi lokal Lamongan yang sudah berhasil (seperti 1-10-100) tidak mengalami disrupsi atau pemotongan anggaran (risiko crowding-out) karena prioritas MBG.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, A. N., & Alfaries, M. (2025). Program Pemerintah Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Nasional. *JURNAL ELEKTROSISTA*, 13(1), 28–39. <https://doi.org/10.63824/jtep.v13i1.399>
- Ainun, F. (2025a). *Dua Program Nasional Diintegrasikan, KDMP dan SPPG di Lamongan Resmikan Kerja Sama Perdana*. Berita Jatim. <https://beritajatim.com/dua-program-nasional-diintegrasikan-kdmp-dan-sppg-di-lamongan-resmikan-kerja-sama-perdana>
- Ainun, F. (2025b). *Sayur Jadi Tantangan dalam Uji Coba Makan Gratis di Lamongan*. Berita Jatim. <https://beritajatim.com/sayur-jadi-tantangan-dalam-uji-coba-makan-gratis-di-lamongan>
- Bappelitbangda Lamongan. (2025). *RAPAT EVALUASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS*. Pemerintah Kaabupaten Lamongan. [https://bappelitbangda.lamongankab.go.id/posting/32519?utm\\_source](https://bappelitbangda.lamongankab.go.id/posting/32519?utm_source)
- Budiansyah, D. (2025). *Program Makanan Bergizi di Lamongan, Uji Coba di Enam Sekolah*. Realita.Co. <https://realita.co/baca-35219-program-makanan-bergizi-di-lamongan-uji-coba-di-enam-sekolah>
- CNN Indonesia. (2025). *Belasan Siswa SMA Lamongan Dilarikan ke RS Usai Santap MBG*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250917231526-20-1274877/belasan-siswa-sma-lamongan-dilarikan-ke-rs-usai-santap-mbg>

- Dinas Kominfo Jawa Timur. (2025). *Inovasi Program Stunting 1-10-100 Lamongan Dapat Apresiasi*. Dinas Kominfo Jawa Timur. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/inovasi-program-stunting-1-10-100-lamongan-dapat-apresiasi>
- Emmanulle, K. F. V., Saputra, R. A., Wicaksono, A. S. P. Y., Wicaksana, D. P., & Kamal, U. (2025). Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 1329–1342.
- Gultom, I. (2025). *DPD RI-Pemkab Lamongan dorong penambahan dapur percepat program MBG*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/5073933/dpd-ri-pemkab-lamongan-dorong-penambahan-dapur-percepat-program-mbg>
- Hakim, B. N., & Yuliana, W. (2025). Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 267–283.
- INDEF. (2024). *Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*. <https://indef.or.id/publikasi/dampakmbg/>
- Iswanto, D., Nashiha, D., & Wartana Putra, I. M. A. W. (2026). Does a Policy Trial Operate at the Regional Level? An Analysis of the Free Nutritional Meal Implementation Program in Malang City. *PANGRIPTA*, 9(1), 29–44. <https://doi.org/10.58411/vt3hv719>
- Manshuri, H. (2025). *100 KDMP di Lamongan Sudah Beroperasi, akan Jadi Pemasok SPPG Program MBG*. Surya. <https://surabaya.tribunnews.com/jawa-timur/1922814/100-kdmp-di-lamongan-sudah-beroperasi-akan-jadi-pemasok-sppg-program-mbg>
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2024*.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2025). *Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Evaluasi MBG di Lamongan*. Pemerintah Kabupaten Lamongan. [https://portal.lamongankab.go.id/posting/33450?utm\\_source](https://portal.lamongankab.go.id/posting/33450?utm_source)
- Priyantomo, B. A., Suprayoga, & Iswanto, D. (2026). Public Trust And Digital Governance: Social Media Sentiment On Indonesia's Free Nutritious Meal Program. *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology*, 4(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.19080796>
- Putra, S. F., & Marsal, I. (2025). Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis: Pembebanan APBN atau Menuju Indonesia Emas 2045. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7106–7120.
- Ratmawati, R. (2025). *Dapur MBG di Lamongan Kini Tersebar di Sebelas Titik*. Radar Lamongan. <https://radarlamongan.jawapos.com/berita-utama/2286328532/dapur-mbg-di-lamongan-kini-tersebar-di-sebelas-titik>
- Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2025). Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari tanggung jawab negara. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 1–10.
- SMKN 1 Lamongan. (2025). *Selasa, 19 Agustus 2025, Program Makan Bergizi Gratis dimulai di SMK Negeri 1 Lamongan*. SMKN 1 Lamongan. <https://smkn1lamongan.sch.id/2025/08/19/selasa-19-agustus-2025-program-makan-bergizi-gratis-dimulai-di-smk-negeri-1-lamongan/>
- Subagyo, T. (2025). *SPPG Lamongan kontrol gizi pelajar penerima MBG secara berkala*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/4601994/sppg-lamongan-kontrol-gizi-pelajar-penerima-mbg-secara-berkala>
- Syafiqoh, I., & Setyawati, A. (2025). Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini di Lamongan. *ALMURTAJA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4(1), 31–36